

Mendorong Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Berkelanjutan



29 Oktober 2021



FORUM
KAJIAN **2021**
PEMBANGUNAN

Kacaunya Data Penerima Bansos COVID-19 antara Pusat dan Daerah



Sejumlah warga mengantri saat penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). ANTARA FOTO/Aufi Firmansyah/aww.

Home > Politik

Banyak Penerima Bansos Salah Sasaran, Istana Akui Gunakan Data 2015

Sabtu, 16 Mei 2020 | 06:22 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB



Home > Nasional

Kepala Daerah Diingatkan Perbaiki Data Agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 2 Juni 2020 | 13:38 WIB
Oleh : Stefi Thenu / LES

Covid-19: 'Data tak akurat hingga orang meninggal dapat bansos' problem 'lambannya' serapan bansos

Resty Woro Yuniar
BBC News Indonesia

28 Juli 2020

Gunakan Data Tahun 2011, Banyak Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran

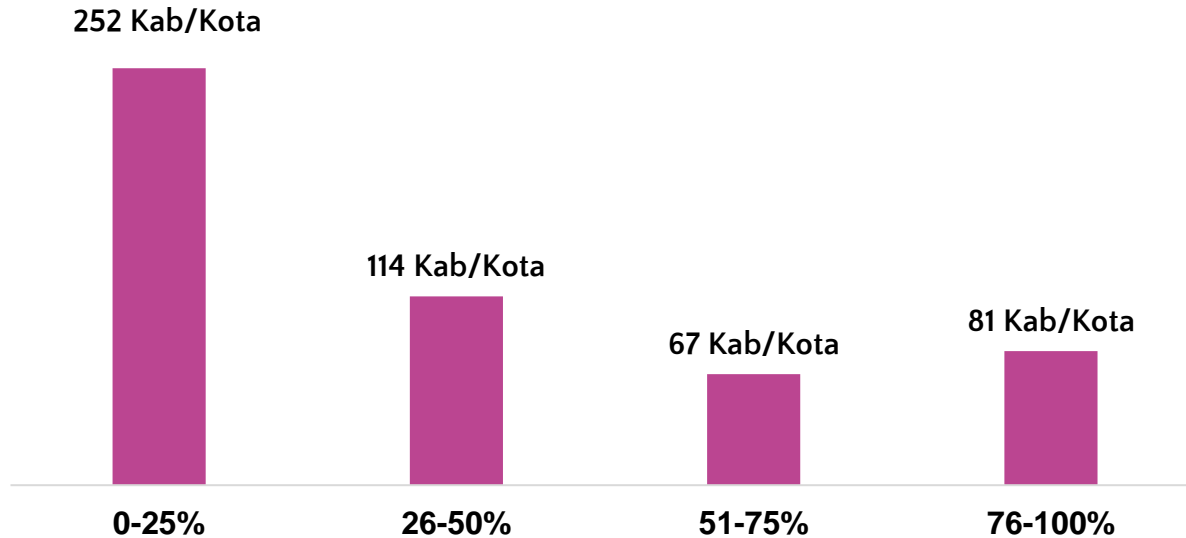
02 AGUSTUS 2021, 12: 00: 59 WIB | EDITOR : NAILUL IMTIHANY

Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dugaan Data dan Nama Penerima Banyak Yang Fiktif

Betty Rotua Purba, Nasional - Minggu 05 September 2021, 20:34 WIB 961x



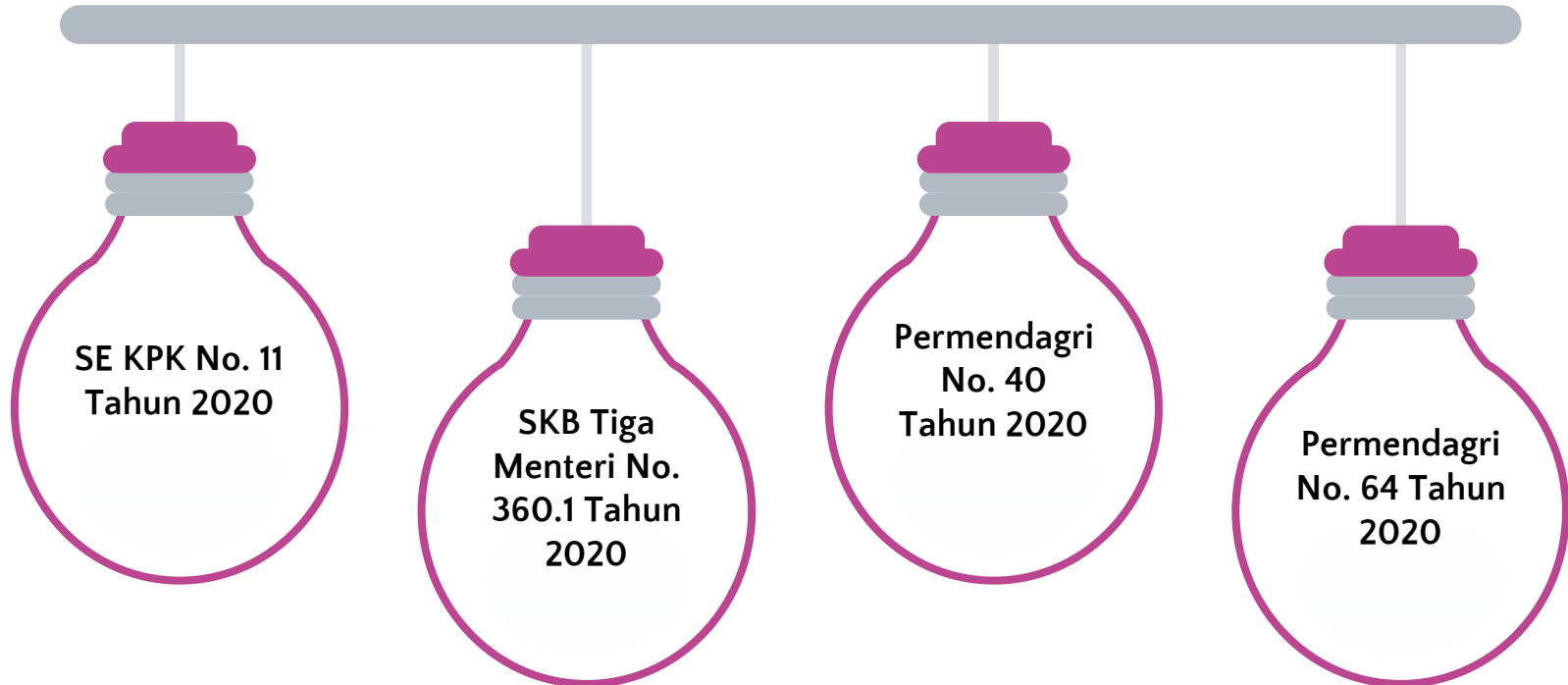
Data **DTKS yang mutakhir dan valid** akan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan **berkontribusi lebih besar** pada upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.



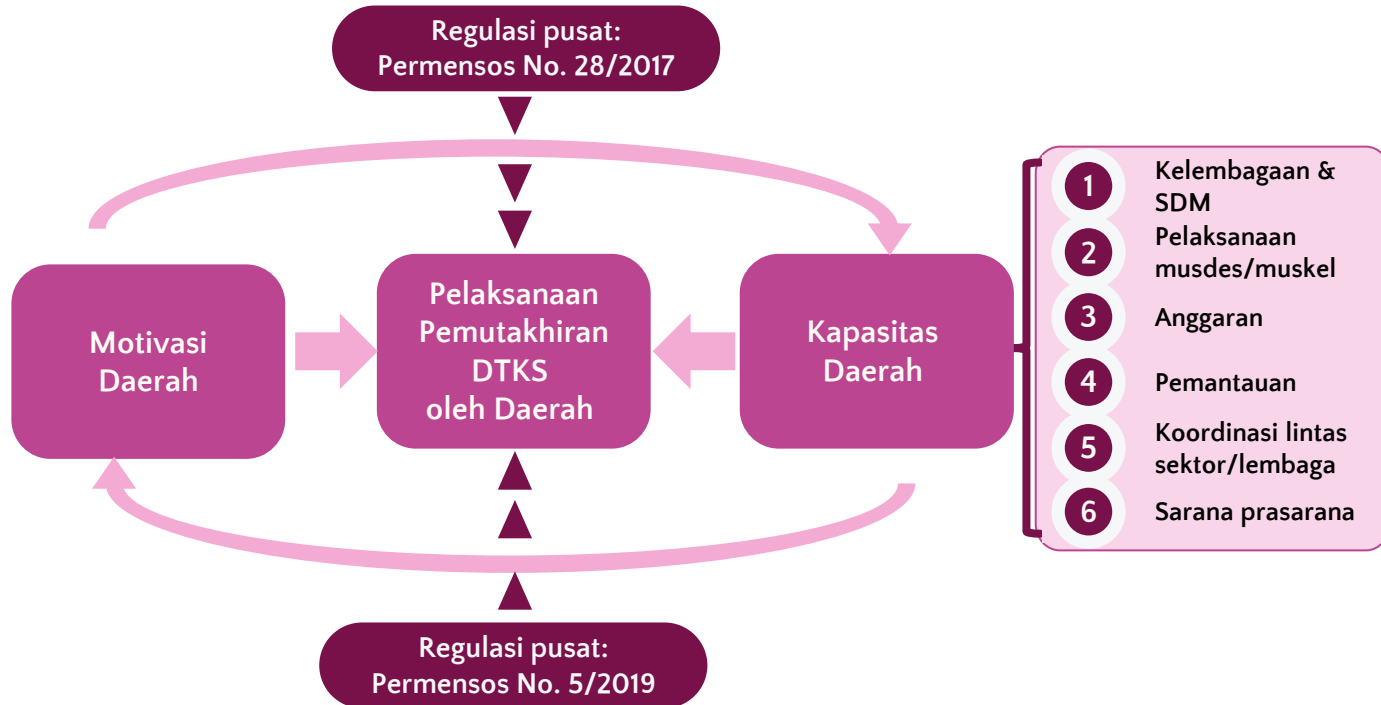
Hanya sepertiga kabupaten/kota di Indonesia yang memutakhirkan data 2015 dengan cakupan rumah tangga di atas 50% per Oktober 2020 (Pusdatin Kesos, 2021)

Kesalahan data yang masih sering terjadi perlu segera **diatasi** agar bantuan sosial dapat diterima oleh **kelompok** yang benar-benar **membutuhkannya**.

Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk memperbaiki ketepatan data

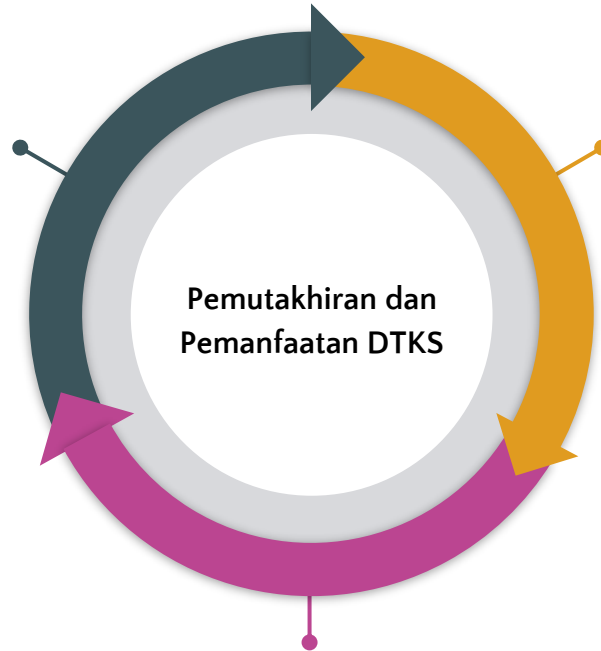


Semua pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan pemutakhiran DTKS tetapi frekuensi, cakupan, dan kualitasnya bervariasi



Pemanfaatan DTKS sebagai acuan penerima program penanganan kemiskinan daerah masih minim

Penggunaan DTKS umumnya baru sebatas pada bansos daerah yang dikelola dinas sosial



Baru sebagian kecil daerah yang sudah memiliki regulasi pemanfaatan DTKS

Makin banyak penggunaan DTKS untuk bansos daerah, proses pemutakhirannya cenderung lebih baik

Beberapa ketentuan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pemutakhiran masih kurang jelas



Ada perbedaan pemahaman terhadap pedoman pemutakhiran



Rentang waktu pemutakhiran cenderung terbatas



Belum tersedia pedoman teknis dan praktis



Variabel kemiskinan dalam DTKS tidak selalu mengakomodasi kondisi kemiskinan di daerah

Kelembagaan dan SDM belum memadai



“Kami tidak bisa *ngomong* kalau data DTKS untuk daerah ini benar-benar valid 100% karena keterbatasan tenaga, kami biasanya *update* sebagian saja DTKS itu [terutama NIK]”
(Operator desa/kelurahan, 2020)

Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan belum berjalan semestinya

1

Cenderung formalitas

2

Ada yang dilakukan setelah kunjungan rumah tangga

3

Keterwakilan peserta terbatas

4

Fokus membahas usulan baru

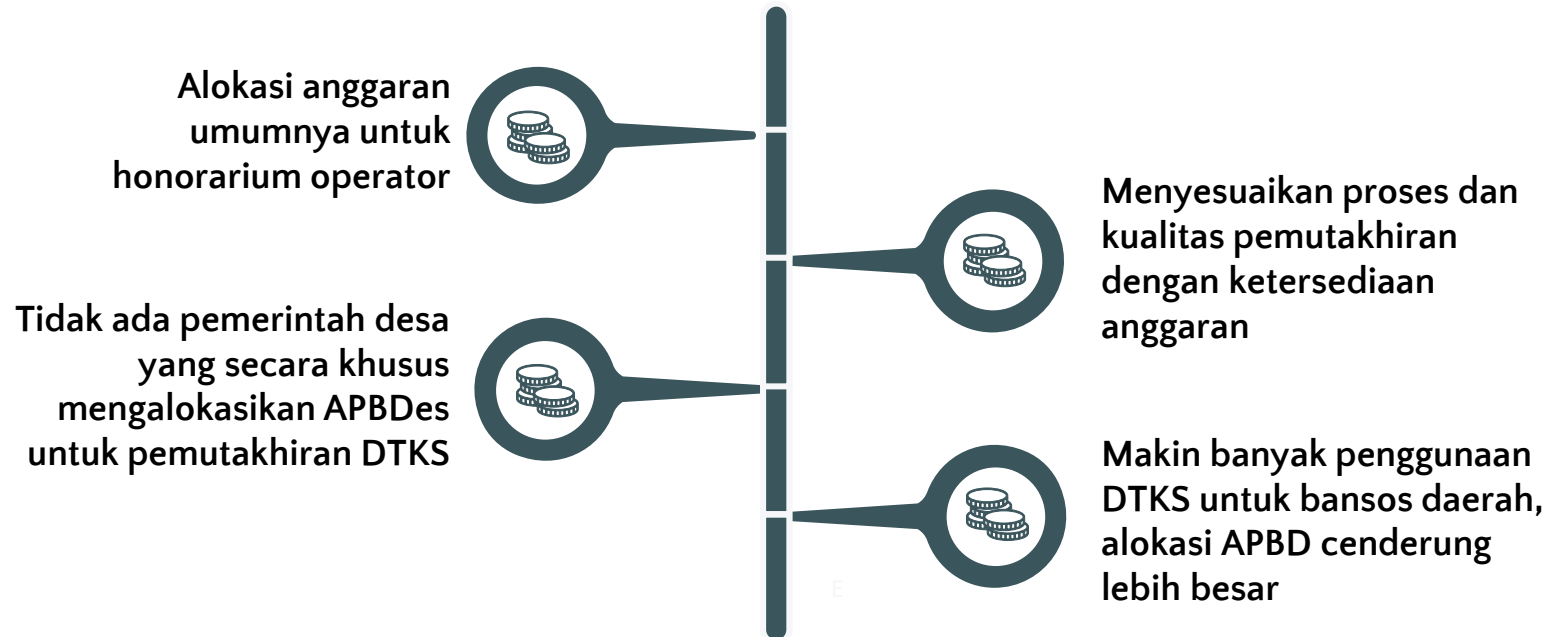
5

Enggan karena hasil sebelumnya tidak diakomodasi

6

Hanya mengacu pada variabel kemiskinan DTKS

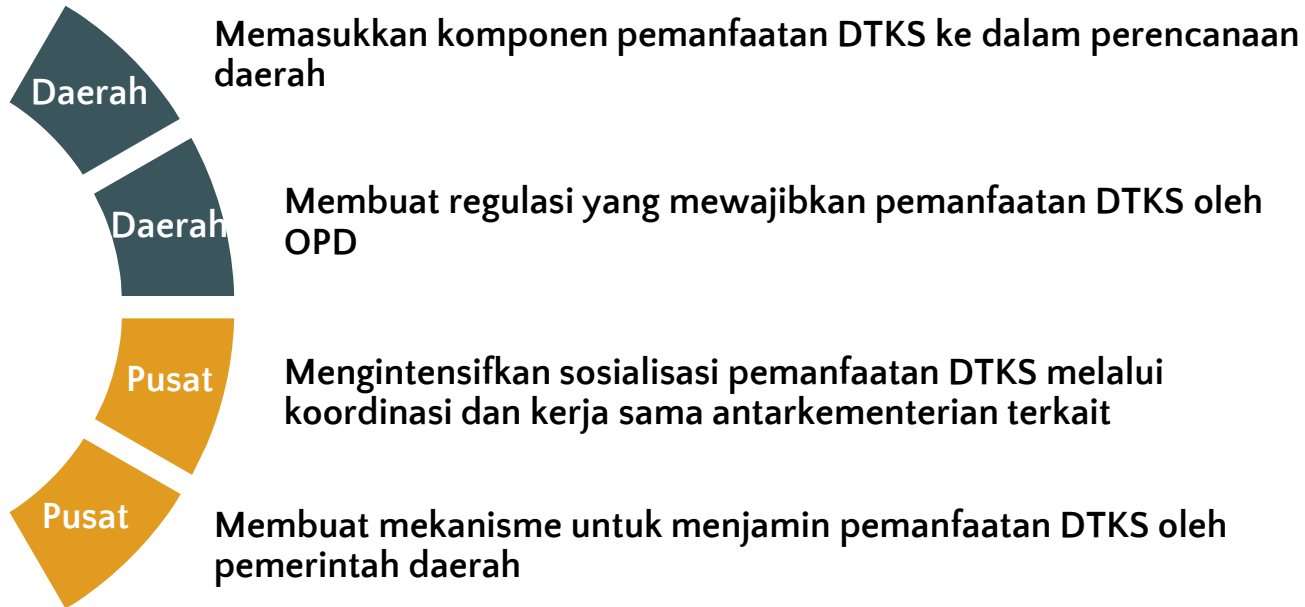
Pengalokasian anggaran pemutakhiran DTKS bervariasi dan cenderung terbatas



Motivasi dan **kapasitas daerah** untuk melakukan pemutakhiran DTKS dengan benar perlu **ditingkatkan**

1

Mendorong pemanfaatan DTKS oleh pemerintah daerah agar termotivasi melakukan pemutakhiran yang berkelanjutan



2

Memastikan ketentuan terkait pemutakhiran DTKS dapat dipahami dan diacu dengan benar oleh pelaksana di daerah



Membuat pedoman teknis dan praktis tentang mekanisme pemutakhiran dan pemantauan

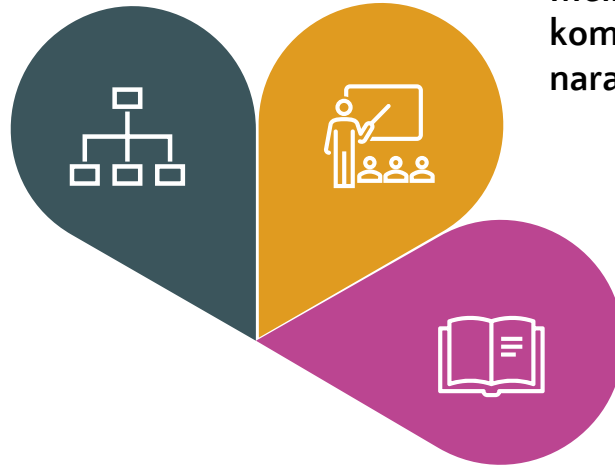


Menyegerakan sosialisasi peraturan terbaru terkait pengelolaan dan pemutakhiran DTKS

3

Mendorong tersedianya kelembagaan dan SDM pengelola DTKS yang memadai

Menyediakan tim khusus di bawah dinas sosial sebagai pelaksana pemutakhiran dan pengelola DTKS



Melibatkan lembaga kompeten sebagai narasumber bimtek

Materi bimtek harus mencakup tahapan dan mekanisme pemutakhiran DTKS

4

Memastikan musyawarah desa/kelurahan dilakukan secara konsisten dan sesuai peraturan

Kesesuaian ditekankan pada aspek mekanisme, keterwakilan peserta, dan *prelist* yang dibahas

Mempertimbangkan kriteria kemiskinan daerah

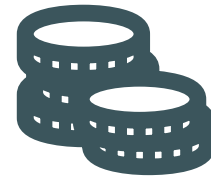


Melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok

5 Memastikan ketersediaan anggaran yang memadai



Bappeda menguatkan koordinasi antarlembaga dalam proses perencanaan/penganggaran



Kontribusi anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi secara proporsional

6

Menguatkan pemantauan, koordinasi, dan ketersediaan sarana prasarana pemutakhiran

Pemantauan dititikberatkan pada tahap bimtek, musyawarah desa/kelurahan, dan kunjungan rumah tangga



Mempercepat penggunaan SIKS-Droid



Bappeda memfasilitasi koordinasi antar-OPD terkait pelaksanaan pemutakhiran



*Dukungan dan keterlibatan dari semua tingkat pemerintahan diperlukan untuk memastikan kegiatan **pemutakhiran DTKS** dilakukan secara **berkelanjutan** dan **berkualitas**.*



“

THANK YOU



www.smeru.or.id



smeru@smeru.or.id



[@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)



[The SMERU Research Institute](https://www.youtube.com/TheSMERUResearchInstitute)



[@smeru.institute](https://www.linkedin.com/company/smeru)



[@riseprogramme.id](https://www.instagram.com/riseprogramme)